



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Panja (Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan)
Dengan	: Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial Banten, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat dan Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 11 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 s.d. 17.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020. 2. Membahas masalah aktual dan alternatif solusinya.
Ketua Rapat	: <b>H. MARWAN DASOPANG</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 11 Anggota Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI; 2. 4 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya; 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten beserta jajarannya; 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Besera jajarannya; 6. Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, **H. Marwan Dasopang** sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten; dan Forum Pekerja Sosial Masyarakat, dengan agenda "**Peran Pemerintah Daerah/Dinas Sosial dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, Dukungan Anggaran Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana**", dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Dinas Sosial Banten didapat temuan:

1. Secara kelembagaan yang melakukan verifikasi data kemiskinan berbeda-beda. Kalau di DKI Jakarta dilakukan oleh Pusdatin Jamsos, sedang di Banten dan Jawa Barat tidak ada lembaga khusus, tapi dilakukan oleh SDM Kesejahteraan Sosial, seperti TKSK.
2. Data terpadu kesejahteraan sosial di Pemerintah belum terkoneksi secara baik dengan Pusdatin di Kementerian Sosial RI.
3. Metode yang dilakukan untuk memutakhirkan data kemiskinan juga berbeda, di DKI Jakarta, misalnya dibuka pendaftaran masyarakat miskin yang kemudian diverifikasi oleh petugas terkait dan di Banten melalui forum konsultasi publik (FKP).
4. *Supporting* SDM dan sarana-prasarana belum memadai untuk melakukan verifikasi data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu dari 27 kab/kota di Jawa Barat yang baru melakukan verifikasi 14 kab/kota.
5. Belum terdapat dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah untuk proses verifikasi data kemiskinan, karena tidak adanya dana ini berimplikasi terhadap pencapaian verifikasi tingkat kab/kota.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**H. MARWAN DASOPANG**